

Aturan Penentuan Kelayakan Subsidi per Instansi

- DINSOS : Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT / Kartu Sembako)

Penerima dianggap layak mendapatkan subsidi apabila memenuhi seluruh kondisi berikut:

1. Penghasilan kurang dari Rp 2.000.000 per bulan
→ menandakan status ekonomi rendah.
2. Jumlah tanggungan keluarga minimal 2 orang
→ semakin banyak tanggungan menunjukkan beban ekonomi tinggi.
3. Kondisi rumah “tidak layak” atau “sederhana”
→ mencerminkan keterbatasan tempat tinggal.
4. Status pekerjaan termasuk “buruh harian”, “petani”, atau “tidak bekerja”
→ mengindikasikan pekerjaan informal atau tanpa penghasilan tetap.

Jika seluruh syarat di atas terpenuhi, maka individu tersebut diberi label:

layak_subsidi = 1

Sebaliknya, jika satu atau lebih syarat tidak terpenuhi, maka:

layak_subsidi = 0

- **DUKCAPIL : Validasi Kependudukan untuk Subsidi**

Penerima dianggap **layak** apabila seluruh data kependudukan menunjukkan kelengkapan dan keabsahan berikut:

1. NIK valid = “ya”
→ memastikan identitas resmi terdaftar di database nasional.
2. Memiliki Kartu Keluarga (KK) = “ya”
→ bukti legal status keluarga.
3. Domisili tetap = “ya”
→ penerima memiliki alamat tetap yang dapat diverifikasi.
4. Data ganda = “tidak”
→ memastikan tidak terjadi duplikasi penerimaan bantuan.
5. Masuk DTKS = “ya”
→ tercatat sebagai keluarga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
6. Jumlah anggota keluarga ≥ 3 orang
→ menunjukkan tanggungan yang cukup besar.

Jika semua kriteria di atas terpenuhi, maka:

layak_subsidi = 1

Jika ada satu atau lebih kondisi tidak terpenuhi:

layak_subsidi = 0

- **KEMENKES : Kartu Indonesia Sehat (KIS)**

Penerima dianggap layak menerima subsidi kesehatan apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Penghasilan kurang dari Rp 2.500.000 per bulan
→ prioritas bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah.
2. Tidak memiliki asuransi kesehatan lain (punya_asuransi_lain = “tidak”)
→ agar subsidi tidak tumpang tindih dengan asuransi swasta.
3. Menderita penyakit kronis (penyakit_kronis ≠ “tidak ada”)
→ kebutuhan medis berkelanjutan memerlukan dukungan pemerintah.
4. Status pekerjaan termasuk “buruh harian”, “petani”, atau “tidak bekerja”
→ pekerjaan tidak tetap menandakan risiko finansial tinggi.
5. Kondisi rumah “tidak layak” atau “sederhana”
→ memperkuat indikasi keterbatasan ekonomi.

Jika semua syarat di atas dipenuhi, maka:

layak_subsidi = 1

Jika tidak, maka:

layak_subsidi = 0

Kesimpulan

Aturan-aturan di atas menggunakan pendekatan berbasis logika deterministik (rule engine) untuk menghasilkan label layak_subsid. Label ini nantinya digunakan sebagai target (output variable) saat melatih model Federated Learning (TFF).

Dengan demikian, setiap lembaga (DINSOS, DUKCAPIL, dan KEMENKES) memiliki aturan kelayakan tersendiri, namun tetap berkontribusi pada tujuan Bersama yaitu menentukan warga yang berhak menerima bantuan subsidi secara adil dan terverifikasi.